

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI
(TKM) DI KABUPATEN PURWAKARTA**

(Studi Kasus : Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes)

Oleh

Nisa Maulida Nurfauziah, Drs. Herbasuki Nurcahyanto, MT

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) program is a program to empower unemployed citizens by giving them entrepreneurship preparation, business fund, and regular assistance done by guidance staff. The method used in this paper is a descriptive qualitative method by using interviews, observation, and documentation to collect the data. The indicators to measure the effectiveness of this program are object accuracy, program socialization, goal completion, and educative monitor and control systems. The research result using those four factors shows the implementation of the Tenaga Kerja Mandiri (TKM) program has not been fully effective yet since there are still some obstacles during the process. Several factors support the effectiveness of this program, such as the high interest of Taringgullandeh residents and also the excellent performance of the trainers. However, several factors also hamper the effectiveness of this program, such as the location of the village that is quite distant from the town center and the conservative residents, limited funding and infrastructure, lack of participation from the government in promoting the products, and the ineffectiveness role of the guidance staff. Therefore, the researcher offers several suggestions for the implementation of this program, such as the government need to be wiser in selecting the target of this program, be more active in promoting this program through various media, and promoting the products produced by the fostered community regularly. The government also needs to give a clear penalty to the guidance staff who do not provide effective assistance.

Keywords: Effectiveness, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Program, Unemployment

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak Negara yang sulit untuk diatasi, termasuk Indonesia. Bila kita amati dari tahun ke tahun, jumlah pengangguran di Indonesia masih berada di persentase yang tinggi. Pengangguran merupakan masalah nasional yang harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta maupun antar instansi pemerintah. Banyaknya jumlah pengangguran jika tidak segera diatasi maka akan berdampak pada berbagai masalah baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan persentase pengangguran tertinggi kedua nasional dengan jumlah 8,16% pada tahun 2018. Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menyumbang angka pengangguran cukup tinggi yaitu mencapai 9,11%. Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Purwakarta disebabkan tingginya jumlah pencari kerja yang

tidak diimbangi dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta masih minimnya kualitas tenaga kerja sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya.

Melihat begitu urgentnya masalah pengangguran harus segera diatasi oleh Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan program unggulan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dimana sejak tahun 2015 kegiatan pengembangan Tenaga Kerja Rentan/Penganggur ini sudah dilakukan.

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan program pemberdayaan pengangguran melalui pembekalan kewirausahaan, pemberian bantuan usaha, dan pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh tenaga pendamping.

Pemberian bantuan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tidak diberikan ke semua Desa, hanya beberapa Desa di setiap Kabupaten /

Kota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui instansi terkait di daerahnya yang memenuhi persyaratan yang dapat menerima bantuan program. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dilaksanakan per tahun anggaran. Di Kabupaten Purwakarta, program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017.

Desa Taringgullandeh merupakan salah satu Desa yang mendapat bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pada tahun anggaran 2019. Jumlah angkatan kerja di Desa Taringgullandeh sebanyak 906 jiwa, dimana 660 jiwa adalah penduduk yang memiliki pekerjaan sedangkan sisanya sebanyak 246 jiwa adalah angkatan kerja yang tidak dan sedang mencari pekerjaan.

Tingkatan pendidikan masyarakat di Desa Taringgullandeh pun masih rendah. Rata-rata penduduk hanya tamatan Sekolah Dasar (SD)/Sederajat saja. Masih tingginya angka pengangguran dan masih minimnya kualitas tenaga kerja yang dimiliki masyarakat Desa Taringgullandeh

menjadikan Desa ini terpilih menjadi salah satu Desa yang menerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Desa Taringgullandeh merupakan Desa yang paling sedikit jumlah serapan tenaga kerja melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Dari jumlah masyarakat penerima program, hanya tersisa 40% saja yang melanjutkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) mengacu pada dokumen Petunjuk Teknis Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 5/PPTKPKK/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2019.

Mengacu pada petunjuk Teknis yang ada, program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ini sasaran utamanya kepada tenaga kerja rentan, yaitu penganggur, setengah penganggur, TKI bermasalah, mantan TKI, TKI gagal berangkat, Tenaga Kerja Wanita rentan, Tenaga

kerja muda, dan angkatan kerja yang berasal dari keluarga miskin. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu pula, fokus utama dari program TKM adalah pendampingan kelompok yang dilakukan oleh tenaga pendamping sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Beberapa fenomena yang terjadi di lapangan tidaklah sesuai dengan apa yang telah diatur melalui Petunjuk Teknis yang ada.

Melihat masih minimnya serapan tenaga kerja yang ada di Desa Taringgullandeh serta melihat masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI (TKM) DI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus : Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

George J. Gordon (dalam Syafiie, 2006) menyatakan bahwa administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta yudikatif. Sedangkan Henry (dalam Mulyadi, 2015) berpendapat bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.

Dari berbagai pengertian administrasi publik menurut beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara

yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara.

2. Manajemen Publik

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Overman (dalam Keban, 2004 : 200) Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, actuating dan controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik.

Adapun manajemen publik dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi publik

bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas program dalam manajemen publik sebagai ukuran pencapaian mengenai program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efektivitas program tersebut sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah, dimana hal tersebut bagian dari salah satu fungsi manajemen yang terakhir yaitu fungsi *controlling* atau pengawasan.

3. Efektivitas Program

Makmur (2011 : 6) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Campbell (dalam Mutiarin Dyah dan Zainudin Arif, 2014 : 97) efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendapat lain

menyebutkan Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983 dalam Satries, 2011).

3.1 Indikator Efektivitas Program

Makmur (2011 : 6) membagi indikator efektivitas program sebagai berikut :

1. Ketepatan perhitungan biaya
2. Ketepatan berpikir
3. Ketepatan tujuan
4. Ketepatan sasaran

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Sosialisasi program
2. Tepat sasaran
3. Tujuan program
4. Pemantauan

Menurut Campbell (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014 : 96-97) pengukuran efektivitas program yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat output dan input
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sondang P. Siagian (2008:83-36) berpendapat lain mengenai kriteria atau ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program, yaitu sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Adapun fenomena yang digunakan untuk melihat efektivitas

program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran
2. Sosialisasi program
3. Pencapaian tujuan menyeluruh
4. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondineli (1983) (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014 : 98-99) menyebutkan faktor yang mempengaruhi efektivitas dan dampak dari suatu program yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan, yakni menurut Fadil Ali, etc (2011) dapat berasal dari budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial, hukum dan dari kondisi alam (geografis).
2. Sumber daya merupakan sumber daya yang digunakan dalam mendapatkan kebermanfaatan dari pelaksanaan program.
3. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yakni sumber daya yang terlibat dalam proses

pelaksanaan program menjadi penentu tercapainya tujuan program. Para pelaksana program ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang yang sesuai dengan program.

E. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Situs penelitian ini adalah Desa Taringgullandeh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Informan dipilih secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah informan menguasai masalah, memiliki data dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan secara akurat. Subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
2. Aparatur Desa Taringgullandeh
3. Tenaga Pendamping
4. Tenaga Pelatih
5. Ketua kelompok TKM Desa Taringgullandeh

6. Masyarakat penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Desa Taringgullandeh

Jenis data yang digunakan yaitu kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis dan interpretasi dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 246), terdiri reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menguji kualitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

1. Ketepatan Sasaran

Menurut Makmur (2011 : 8) ketepatan sasaran merupakan sejauh mana kesesuaian antara penerima program dengan kriteria penerima program yang telah ditentukan

sebelumnya. Ketepatan sasaran berfungsi untuk melindungi masyarakat yang seharusnya menerima program sehingga akan menimbulkan kebermanfaatan bagi masyarakat yang seharusnya menerima program tersebut. Ketepatan sasaran penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh akan menentukan seberapa efektif pelaksanaan program. Karena jika di lapangan terbukti masih ada masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tentu akan merugikan masyarakat yang berhak menerima program.

Berdasarkan hasil wawancara bersama para informan dapat diketahui bahwa penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh sudah tepat sasaran. Hal tersebut terbukti pada warga yang menjadi informan merupakan kalangan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menemukan temuan lain bahwa ditemukan 2 (dua) orang masyarakat penerima

program bukan berasal dari pengangguran atau pun tenaga kerja lainnya. Salah satu persyaratan penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 750.000,- per bulan. Jika keduanya dipilih berdasarkan kriteria minimnya penghasilan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, mereka mendapat penghasilan pokok sebesar Rp. 1.400.000,- per bulan nya dari hasil pekerjaannya.

Selain itu juga, kriteria lain dari penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah mereka yang memiliki *basic* bidang usaha yang diberikan, dalam hal ini adalah menjahit. Jika pun keduanya menerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) atas dasar keterampilan menjahit yang dimiliki sebelumnya, hal tersebut bisa diterima, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki *basic* menjahit sama sekali.

2. Sosialisasi Program

Menurut Budiani (2007), sosialisasi program merupakan penyebarluasan informasi baik itu

program, kebijakan, ataupun peraturan dari pihak pembuat atau pemilik program, kebijakan, dan peraturan kepada pihak-pihak lain yang menjadi pelaksana ataupun yang menjadi sasaran dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama para narasumber dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi dalam program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Sosialisasi pertama ditujukan kepada seluruh perwakilan perangkat Desa di Kabupaten Purwakarta mengenai adanya program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang kemudian perwakilan perangkat Desa menyebarluaskan kembali pada masyarakat Desa. Metode yang digunakan yaitu secara tatap muka langsung dan menggunakan *powerpoint* sebagai media penyampaian materi yang diberikan. Pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kabupaten berlangsung cukup efektif meskipun hanya dengan metode konvensional dengan mengumpulkan seluruh perwakilan perangkat tiap Desa di Kabupaten Purwakarta.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta belum memanfaatkan media sosial sebagai media penyampaian program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), sehingga penyampaian informasi mengenai program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) belum menyebar secara meluas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Setelah sosialisasi di tingkat Kabupaten dilakukan, selanjutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat Desa yang pada akhirnya menerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Di Desa Taringgullandeh pelaksanaan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan pemberian materi terkait kewirausahaan serta pengelolaan keuangan dan pelatihan menjahit selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Terbatasnya waktu yang diberikan untuk sosialisasi serta digabungkannya kegiatan sosialisasi dengan pemberian materi dan pelatihan membuat masyarakat tidak mampu menguasai secara maksimal mengenai materi yang disampaikan. Sehingga pemahaman masyarakat

terhadap program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kurang, masyarakat kurang memahami pelaksanaan teknis terkait program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), yang masyarakat ketahui mereka hanyalah mendapatkan bantuan usaha dari Disnakertrans tetapi tidak tahu apa tujuan dan manfaat dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

3. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Menurut Campbell (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014), efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama para Narasumber dapat diketahui bahwa jika dilihat dari aspek membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa

Tarunggulandeuh belum dapat terlihat, padahal seharusnya dengan program ini dapat membuka kesempatan kepada masyarakat lainnya yang lebih luas untuk memiliki pekerjaan. Fakta di lapangan yang terjadi bukannya menambah minat masyarakat yang tidak menerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk bergabung bersama, justru masyarakat yang menerima bantuan program pun turut mengundurkan diri dari kelompok TKM Desa Tarunggulandeuh. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anggota kelompok yang saat ini berkurang menjadi 8 (delapan) orang saja dari awalnya sejumlah 20 Orang. Hanya tersisa 40% dari masyarakat penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang pada akhirnya melanjutkan kelompok TKM Desa Tarunggulandeuh.

Jika dilihat dari aspek mengurangi angka pengangguran belum dapat terlihat. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) belum mempunyai pekerjaan yang tetap dengan adanya

program TKM karena masih minimnya produksi yang dilakukan sehingga masyarakat bekerja hanya 2 (dua) hari dalam waktu 1 (satu) minggu.

Jika dilihat dari aspek peningkatan pendapatan pun belum terdapat perubahan terhadap hal itu. Masyarakat hingga saat ini belum mendapatkan upah berupa gaji selama 1 (satu) tahun produksi ini. Keuntungan yang didapatkan terus dimasukkan kembali ke uang kas untuk modal usaha berikutnya karena dari pihak Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Desa tidak memberikan bantuan usaha berupa modal awal untuk keberlanjutan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Masyarakat menginginkan bantuan dari pemerintah Desa berupa modal usaha atau dimasukkan ke BUMDes tetapi pemerintah Desa Taringgullandeh belum mampu mewujudkannya karena usaha tersebut belum besar. Masyarakat belum merasakan dampak secara ekonomis dari pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), mereka hanya mendapatkan dampak secara sosial dari pelaksanaan

program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh.

4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Menurut Sondang P. Siagian (2008), pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program. Siagian juga berpendapat bahwa pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik seharusnya lebih menekankan pada usaha-usaha yang bersifat preventif ketimbang represif.

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta serta tenaga pendamping yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang diberi tugas untuk terus melakukan pendampingan serta pengendalian dan pengawasan kepada kelompok masyarakat Desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditetapkan.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta melakukan pengawasan setiap 1 (satu) bulan sekali yang dilakukan dengan melakukan kunjungan secara langsung ke Desa Taringgullandeh. Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat pasca pemberian bantuan dan pelatihan diberikan. Meskipun terkendala oleh waktu dan jarak, pengawasan juga dilakukan melalui media komunikasi *online* grup *whatsapp* yang terdiri dari pemerintah, tenaga pendamping, tenaga pelatih, serta kelompok TKM Desa Taringgullandeh. Melalui grup *whatsapp* tersebut masyarakat sering menyampaikan keluhan kesahnya, kesulitan yang dihadapi, juga berkonsultasi kepada tenaga pelatih bagaimana caranya menghasilkan produk yang unggul dan berkualitas.

Berbeda dengan peran pemerintah, peranan tenaga pendamping atau biasa yang disebut Tenaga Kerja Sukarela (TKS) seharusnya lebih intens, mengingat begitu pentingnya peranan tenaga pendamping untuk selalu

mendampingi serta melakukan pengawasan dan pengendalian kepada masyarakat. Tenaga pendamping seharusnya terus menerus melakukan pendampingan minimal 1 (satu) minggu sekali selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran untuk mendampingi masyarakat agar mampu dan mandiri membangun usaha yang dibangunnya. Namun fakta di lapangan tidak demikian, pendamping kelompok masyarakat TKM Desa Taringgullandeh jarang melakukan pendampingan ataupun kunjungan ke lapangan karena beralasan kondisi geografis Desa Taringgullandeh yang jauh dari pusat Kota serta terkendala oleh waktu yang terbatas.

Pentingnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah maupun tenaga pendamping akan mempengaruhi keefektifan pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh. Mengingat hal penting dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ini adalah proses pendampingan yang seharusnya dilakukan secara

kontinyu kepada masyarakat. Karena masyarakat tidak akan mampu mandiri dengan lepas tangan begitu saja tanpa adanya bantuan dari pemerintah ataupun tenaga pendamping.

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan dapat berasal dari budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial, hukum dan kondisi geografis. Efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (geografis) dan kondisi sosial budaya.

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Taringgullandeh yang masih tradisional dan tidak mampu berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia, serta kondisi tenaga pelatih yang tidak bisa berbahasa sunda menjadikan sulit berinteraksi antara masyarakat dan pelatih, sehingga

komunikasi yang terjalin ketika pemberian materi dan pelatihan kurang efektif. Serta masih minimnya pendidikan masyarakat Desa Taringgullandeh membuat mereka merasa kesulitan dalam menyerap materi yang diberikan mengingat singkatnya waktu yang diberikan dan dijadikannya waktu yang bersamaan antara sosialisasi, pemberian materi, dan pemberian pelatihan.

Selain itu juga, kondisi letak geografis Desa Taringgullandeh yang jauh dengan pusat kota membuat tenaga pendamping menjadi jarang melakukan pendampingan dan pengawasan secara langsung ke lapangan dengan alasan sulitnya akses menuju Desa Taringgullandeh. Sebab kondisi geografis yang jauh dari pusat kota juga membuat masyarakat kesulitan untuk mencari bahan baku produksi sehingga proses produksi menjadi terhambat karena keterbatasan bahan baku yang ada di sekitar Desa Taringgullandeh.

2. Kondisi Sumber Daya

2.1 Sumber Daya Manusia

Tingginya antusias dan minat masyarakat Desa Taringgullandeh terhadap pelaksanaan program TKM hal ini terbukti dari antusiasme warga ketika mendapatkan pelatihan menjahit meskipun terbatasnya waktu dan minimnya pengetahuan mereka tentang menjahit tetapi mereka terus berusaha dan bersemangat untuk belajar menjahit.

Di samping itu, dalam kelompok masyarakat TKM Desa Taringgullandeh terdapat salah satu warga yang memang sudah menguasai bidang menjahit. Selanjutnya masyarakat lainnya terus berguru pada warga tersebut hingga saat ini.

2.2 Keuangan

Kondisi keuangan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh. Pasalnya, kelompok TKM di Desa Taringgullandeh keterbatasan dalam modal usaha yang dimiliki karena pemerintah setempat baik itu pemerintah daerah (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta) atau pun

pemerintah Desa tidak pernah memberikan bantuan berupa modal usaha berbentuk uang. Padahal masyarakat menginginkan adanya bantuan dari pemerintah untuk keberlangsungan kelompoknya agar terus berkembang. Karena keterbatasan modal itu pula menjadikan kelompok masyarakat TKM Desa Taringgullandeh tidak mampu memproduksi dengan efektif dan masyarakat belum mendapatkan penghasilan dari usahanya selama hampir 1 (satu) tahun ini.

2.3 Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi sarana prasarana pada kelompok masyarakat TKM Desa Taringgullandeh menjadi faktor penghambat dalam keefektifan pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Karena minimnya jumlah mesin jahit yang tersedia ketika pelatihan membuat pelaksanaan pelatihan kurang efektif. Selain singkatnya waktu pelatihan yang diberikan, jumlah mesin jahit pun yang tersedia hanya 8 (delapan) unit yang digunakan sebanyak 20 orang masyarakat yang menerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) secara bergiliran.

Selain itu juga, belum tersedianya gedung atau tempat untuk usaha kelompok masyarakat TKM Desa Taringgullandeh. Saat ini masyarakat masih menggunakan salah satu ruangan yang menyatu dengan balai desa. Dimana hal tersebut mengganggu aktivitas urusan tata kelola pemerintahan di Desa Taringgullandeh.

3. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Kemampuan pemerintah daerah yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dapat dikatakan sudah cukup baik. Pemerintah daerah sudah melakukan tugas dan peranan sebagaimana mestinya. Pemerintah selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung ke Desa Taringgullandeh tiap 1 (satu) bulan sekali. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta hanya kurang maksimal dalam urusan teknis lapangan karena minimnya waktu yang disediakan pemerintah dalam rangka sosialisasi, pemberian materi, dan pelatihan yang diberikan.

Kemampuan tenaga pendamping dalam mendampingi kelompok masyarakat TKM Desa Trainggullandeh belum efektif dilakukan. Karena seharusnya pendamping terus mendampingi secara langsung kepada masyarakat tiap 1 (satu) minggu sekali selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Akan tetapi pendamping belum melaksanakan peran sebagaimana mestinya. Seharusnya pendamping terus memberikan motivasi dan menjalin kemitraan antar kelompok masyarakat penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) atau pun dengan kelompok usaha lainnya. Menurut penuturan masyarakat, peran pendamping tidaklah terlihat pada kelompok TKM Desa Taringgullandeh.

Kemampuan agen tenaga pelatih (*trainer*) dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat sudah dinilai cukup baik oleh masyarakat. Penyampaian tenaga pelatih yang sabar dalam melatih masyarakat meskipun mereka sama-sama kesulitan dalam berkomunikasi karena keterbatasan penguasaan bahasa yang dimiliki. *Trainer* juga

memberikan waktu tambahan untuk melatih masyarakat di luar waktu kontrak yang disepakati bersama pemerintah karena adanya rasa empati kepada masyarakat karena melihat antusias masyarakat yang tinggi dalam berlatih menjahit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeu Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeu belum efektif. Belum sepenuhnya masyarakat penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeu berasal dari kalangan pengangguran atau pun tenaga kerja rentan lainnya, masih ditemukan beberapa masyarakat penerima program yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sosialisasi program yang dilakukan belum melalui media cetak

atau pun media *online*. Program TKM di Desa Trainggullandeu belum mampu mencapai tujuannya untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, ataupun meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat penerima program. Sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh tenaga pendamping belum efektif dilakukan di Desa Taringgullandeu.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeu Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Faktor pendorong efektivitas program TKM di Desa Taringgullandeu adalah antusias masyarakat penerima program yang sangat tinggi dan didukung dengan kemampuan tenaga pelatih yang sudah baik. Adapun faktor penghambat adalah kondisi masyarakat yang masih tradisional, letak geografis yang jauh dari perkotaan, sumber daya dan sarana prasarana yang terbatas, pemerintah kurang cukup dalam memberikan

waktu dan bantuan modal, serta masih minimnya komitmen tenaga pendamping yang menghambat keefektifan program TKM di Desa Taringgullandeh.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan terhadap pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta dengan cara :
 - a. Diperlukan rangkaian seleksi yang tepat dan tegas dari pemerintah daerah. Penyeleksi penerima program sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pihak Dinas, pihak lain seperti para akademisi atau pun LSM dapat turut serta menyeleksi sasaran penerima program.
 - b. Sosialisasi program sebaiknya pemerintah daerah menggunakan media cetak seperti brosur atau *pamflet* yang disebar di tempat-tempat strategis serta sebaiknya mensosialisasikan program melalui media *online*.
 - c. Pemerintah daerah sebaiknya membantu mempromosikan hasil produksi masyarakat binaannya secara berkala.
 - d. Diperlukan pemahaman kepada masyarakat mengenai pinjaman modal usaha kepada pihak ketiga (*bank*).
 - e. Diperlukan penerapan sanksi yang tegas bagi tenaga pendamping yang tidak mampu melakukan pendampingan dengan baik.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya khususnya yang akan meneliti program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk meneliti menggunakan fenomena lain selain fenomena yang telah digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Keban.T Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gava Media; Yogyakarta.
- Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*. Bandung: , Refika Aditama
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. 2014. *Manajemen Birokrasi*

dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Jurnal

Ni Wayan, Budiani. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1

Satries, Wahyu Ishardino. 2011. *Efektivitas Pemberdayaan Pemuda pada Organisasi Kepemudaan Al Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi*. Tesis Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Internet :

<https://jabar.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3>

http://rri.co.id/bandung/post/berita/470223/seputar_jabar/tenaga_kerja_mandiri_mampu_mengurangi_pengangguran_di_purwakarta.html

<https://tumoutounews.com/2017/11/12/jumlah-pengangguran-di-jawa-barat-tertinggi-kedua-nasional/>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/07/p26021382-purwakarta-sisir-pengangguran-lalu-ini-yang-dilakukan>

Lainnya

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 5/PPTKPKK/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah pada Pasal 10